

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Urbanisasi di Indonesia meningkat sangat pesat. Pada tahun 1920, proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan hanya sekitar 5,8% dari seluruh penduduk yang ada (Soegijoko dan Bulkin, 1994). Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 1995, pada tahun tersebut tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 35,91%. Menurut United Nations (ESCAP, 1993: II-16) dan Wirosuharjo (1992), pertambahan penduduk diperkotaan di Indonesia sekitar 65 % disebabkan oleh migrasi dan reklasifikasi. Hanya sebesar 35 % yang disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan itu sendiri. Proyeksi yang dilakukan sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 55,19% (Firman,1992). Jika dikaji lebih mendalam, tampak nyata bahwa tingkat urbanisasi di Pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan di luar Pulau Jawa (Firman, 1996 dalam Tjiptoherijanto, 1999).

Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistik (Bintarto, 1991). Permasalahan yang ada di desa mendorong sebagian manusia untuk berurbanisasi di perkotaan untuk mengadu nasib maupun tujuan lainnya. Namun dengan adanya urbanisasi dari desa ke kota ini mengakibatkan permasalahan di perkotaan karena hal ini berpengaruh pada bertambahnya jumlah penduduk yang berada di perkotaan. Salah satu permasalahan yang berat berada di masalah permukiman. Disamping itu harga tanah yang tinggi di perkotaan dan rendahnya pendapatan perkapita menyebabkan masyarakat yang berurbanisasi memilih tempat tinggal di pinggiran kota dengan lingkungan serta sarana dan prasarana yang tidak memadai (Penulis, 2020). Akibatnya suatu lahan di perkotaan menerima beban yang melebihi kemampuan daya dukung lingkungannya dan cenderung menjadi kumuh.

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam permukiman kumuh sifatnya beragam, ada yang dikarenakan infrastruktur yang buruk ada juga karena hanya perilaku masyarakat yang kurang peduli di dalam permukiman yang sehat. (Penulis, 2020)

Permukiman kumuh ini diartikan merupakan permukiman yang tidak layak huni akibat tidak adanya keteraturan bangunan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011). Aspek penting permukiman kumuh ini terdiri dari tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana yang terdapat di suatu permukiman kumuh. Salah satu parameter untuk mengukur permukiman kumuh tersebut dapat dilihat dari kondisi sarana dan prasarana yang dimaksudkan seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik (Dok RKPKP Tahun 2015).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas pemukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jendral Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Tujuan program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan program KOTAKU diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Dalam pencapaian program KOTAKU salah satu dari beberapa banyak wilayah Kelurahan Sangkrah menerapkan target Seratus Kosong Seratus (100 0 100).

Maksud dari target tersebut 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi yang baik (Dok. Program KOTAKU Tahun 2015).

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surakarta mencapai 539,55 Hektar yang tersebar di 5 kecamatan diantaranya Pasar Kliwon, Jebres, Banjarsari, Laweyan dan Serengan. Menurut Walikota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo dalam Kota Surakarta.go.id mengatakan bahwa Kota Surakarta ditunjuk sebagai *pilot project* Program KOTAKU skala nasional. Di 5 kecamatan tersebut ditetapkan skala prioritas dalam penanganan permukiman kumuh, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

No	Kawasan	Luas kumuh (ha)
1.	Semanggi	76,03
2.	Bantaran Kali Anyar	36.649
3.	Danukusuman	26.021
4.	Pucangsawit	17.618
5.	Purwodiningratan	15.588

Sumber : Dok. RKPKP Tahun 2015

5 kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh yang ditunjukkan tabel 1.1 diatas, peneliti tertarik pengambilan lokasi penelitian di Kawasan Semanggi dikarenakan kawasan tersebut terdapat luasan kumuh yang lebih banyak dibandingkan kawasan lainnya. Kawasan Semanggi ini dibagi menjadi 5 yaitu Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Sewu dan Kelurahan Gandekan. 5 kelurahan yang berada di kawasan Semanggi tersebut, peneliti memilih lokasi penelitian lebih mendalam di Kampung Sangkrah dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah pinggiran di Kota Surakarta dimana daerah tersebut juga merupakan daerah bantaran yang merupakan margin atau saluran utama sungai dengan tanggul alam. Banjir sering melanda di daerah ini karena drainase dari permukiman tidak dapat dialirkan ke sungai karena

elevasi air sungai lebih tinggi dari permukiman. Di musim penghujan air sungai meluap sampai ke permukiman dan bisa menyebabkan genangan. Sarana dan prasarana yang ada menjadi rusak dan lingkungan menjadi lebih kumuh. Akses terhadap sanitasi, drainase dan kekumuhan fisik lainnya yang tidak memenuhi standar teknis mengakibatkan Kampung Sangkrah ini dikategorikan kumuh (Dok. RKPKP Tahun 2015).

Luas kawasan permukiman kumuh Kampung Sangkrah 13,29 Ha. Alasan pemilihan lokasi di Kampung Sangkrah mempunyai karakteristik dari segi sosial maupun fisik yang mencolok. Sudut pandang sosial mempunyai sesuatu yang mencolok yaitu mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah dan kesadaran masyarakat dalam menata lingkungan minim. Segi fisik yang lokasi dekat dengan belantaran Sungai Bengawan Solo, Sungai Pepe, Sungai Tegal Konas dan Sungai Jenes berada di daerah permukiman padat karena merupakan kawasan tersebut termasuk kawasan pinggiran kota.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi Kawasan kumuh ini. Mulai dari program pengentasan kemiskinan yang dianggap penyebab utamanya kawasan kumuh hingga program yang bersifat spesifik. Pemerintah pusat mencoba menangani permasalahan ini dengan meluncurkan skema program P2KP, P2KKP, sampai dengan program PNPM-Mandiri yang kesemuanya dilaksanakan dengan pola BKM (Bantuan Langsung Masyarakat). Sebagian dari program-program ini ada yang telah berjalan dengan baik namun sebagian yang lain belum mencapai hasil optimal. Dengan adanya Program KOTAKU ini diharapkan membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Kementrian PUPR,2016).

Penerapan Program KOTAKU di Kota Surakarta hingga saat ini masih banyak menemukan kendala, tantangan maupun hambatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Disatu sisi program KOTAKU membawa dampak baik

secara nasional dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah perkotaan namun disisi lain juga berdampak buruk pada prioritas-prioritas program pemerintah daerah yang ingin di capai. Hal ini di karenakan tumpang tindih antara program-program sebelumnya dalam pelaksanaannya serta tidak adanya fokus orientasi dan tujuan yang ingin di capai. Faktanya upaya pencapaian target bebas kumuh juga cenderung sangat sulit untuk dicapai hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama menyangkut bertambahnya jumlah penduduk yang masuk ke kota sehingga menimbulkan kepadatan penduduk namun untuk pemukiman tidak memadai sehingga penduduk-penduduk yang masuk ke kota membangun rumah- rumah yang tidak layak huni

Untuk mengetahui persepsi masyarakat penerima manfaat setelah adanya program KOTAKU yang dilakukan di Kampung Sangkrah maka dilakukan melalui penelitian ini, sehingga hasil dari penelitian dapat menjadi masukan untuk perbaikan program dimasa yang akan datang. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kotaku Dalam Penataan Permukiman Kumuh Di Kampung Sangkrah, Kota Surakarta Tahun 2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana persepsi masyarakat penerima manfaat setelah adanya program KOTAKU di Kampung Sangkrah tahun 2020?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat penerima manfaat setelah adanya program KOTAKU sebagai upaya peningkatan serta pemeliharaan permukiman kumuh khususnya di Kampung Sangkrah.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian yang membahas Persepsi masyarakat terhadap Program KOTAKU dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Sangkrah memiliki kaitan yang erat dengan Ilmu Geografi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan lain. Hal ini berupa mengetahui persepsi masyarakat penerima manfaat setelah adanya program KOTAKU.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan pemerintah dalam hal

- a. Mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
- b. Dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi program penanganan permukiman kumuh di Kota sehingga pemerintah memiliki kemampuan dalam mengelola Kota.

## **1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya**

### **1.5.1 Telaah Pustaka**

#### **1.5.1.1 Permukiman Kumuh**

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. (Sri Kurniasih, 2007). Dengan kata lain kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Menurut kamus ilmu-ilmu sosial *Slum's* diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. Jadi daerah *Slum's* dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat. Dalam kamus

sosiologi *Slum's* yaitu diartikan sebagai daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan (Soerjono, 1985). (Dalam buku *Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa* Luthfi Muta'ali dan Arif Rahman Nugroho, 2016)

Hebert J. Gans (1968) mengartikan permukiman kumuh dengan kalimat *'obsolescence per se not harmful addesignation of an area as a slum for the reason alone is merely a reflection of middle class standards and middle class incomes'*, yang dapat diartikan permukiman kumuh sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Darakakis-Smith (1980) dan Grimes (1976) mengartikan permukiman kumuh adalah kompleks permukiman yang secara fisik daerah kumuh, ditandai oleh bentuk rumah kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola *settlement* yang tidak teratur, kualitas lingkungan yang rendah, serta minimnya fasilitas umum. (Dalam buku *Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa* Luthfi Muta'ali dan Arif Rahman Nugroho, 2016)

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

### **1.5.1.2 Karakteristik Permukiman Kumuh**

Karakteristik permukiman kumuh seringkali digambarkan dan identik sebagai kawasan perumahan yang digambarkan memiliki lingkungan yang tidak teratur, kotor, kurang sehat, tidak estetis yang keadaanya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, serta berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurut Soetrisno (1998), secara umum lingkungan permukiman yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh, adalah lingkungan perumahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Kondisi fisik lingkungannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.
- b) Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan semi permanen.
- c) Kepadatan bangunan dengan koefisien dasar bangunan (KDB) lebih besar dari yang diizinkan, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi yang lebih dari 500 jiwa/ha.
- d) Fungsi – fungsi rumah yang bercampur tidak jelas.

Lebih lanjut Soetrisno (1998) mengatakan bahwa lingkungan permukiman kumuh dibagi dalam lima kategori, berdasarkan pola lokasinya yaitu :

- a) Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi strategis dalam mendukung fungsi kota yang menurut rencana kota dapat dibangun bangunan komersial.
- b) Lingkungan permukiman kumuh yang lokasinya kurang strategis dalam mendukung fungsi kota.
- c) Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang menurut rencana kota tidak untuk perumahan
- d) Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang berbahaya, yang menurut rencana kota disediakan untuk jalur pengaman seperti batasan sungai, jalur jalan kereta api dan jalur listrik tegangan tinggi.

- e) Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang menurut rencana kota boleh dibangun untuk perumahan.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- 2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
- 3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
  - a. Jalan Lingkungan
  - b. Drainase Lingkungan
  - c. Penyediaan Air Bersih/ Minum
  - d. Pengelolaan Persampahan
  - e. Pengelolaan Air Limbah
  - f. Pengamanan Kebakaran
  - g. Ruang Terbuka Publik

Karakter fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakter fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, dan kepastian berusaha (Dok. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta ).

### **1.5.1.3 Penyebab Perkembangan Permukiman Kumuh**

Penyebab perkembangan permukiman kumuh dibatasi dalam hal faktor-faktor yang menjadi pemicu perkembangan permukiman kumuh tersebut, yakni faktor ekonomi, geografis dan psikologi (Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa, Luthfi Muta'ali, Arif Rahman Nugroho, 2016).

## **Faktor Ekonomi**

Menurut Turner (1971), yang menunjukkan pada teori tentang kebutuhan dasar dari Moslow, terdapat kaitan antara kondisi ekonomi seseorang dengan skala prioritas kebutuhan hidup dan prioritas kebutuhan perumahan. Dalam menentukan prioritas rumah, seseorang atau sebuah keluarga yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang memberikan kesempatan kerja. Status kepemilikan rumah dan lahan menempati prioritas kedua, sedangkan bentuk maupun kualitas rumah merupakan prioritas terakhir.

## **Faktor Geografi**

Faktor geografi dalam hal ini meliputi letak dan ketersediaan lahan. Lahan di perkotaan khususnya untuk perumahan semakin sulit didapat dan semakin mahal, hal ini tentu saja di luar keterjangkauan sebagian besar anggota masyarakat. Sulitnya akses untuk memperoleh lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain disebabkan oleh spekulasi lahan, kepemilikan lahan yang berlebihan oleh pihak-pihak tertentu, aspek hukum kepemilikan, dan ketidakjelasan kebijaksanaan pemerintah dalam masalah lahan (Abrams,1969).

Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya kantong-kantong permukiman kumuh di kota-kota besar khususnya di Indonesia, tidak terlepas dari fenomena mobilitas penduduk yang ditengarai adanya gerakan sentripetal dan sentrifugal. Gerakan sentripetal dan gerakan sentrifugal mengacu pada teori kekuatan dinamis (*dynamic forces theory*) yang dikemukakan oleh Colby (1993). Dalam teorinya, Colby mengemukakan sebuah teori kekuatan dinamis yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan khususnya sebagai lahan permukiman yang ada pada sebuah kota dan pinggiran sekitarnya. Teori kekuatan dinamis ini menyatakan bahwa pada suatu kota dikenal ada dua macam gerakan yang sangat berperan dalam mempengaruhi kondisi pemanfaatan lahan khususnya lahan permukiman, gerakan tersebut adalah gerakan sentripetal dan gerakan sentrifugal.

## **Faktor Psikologis**

Di dalam permukiman tidak hanya sebagai perlindungan tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya proses sosialisasi. Proses ini adalah suatu pembelajaran seorang individu diperkenalkan kepada nilai serta adat yang ada dalam masyarakatnya. Dalam permukiman dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak hanya sekedar kebutuhan fisik tetapi kebutuhan psikis seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk aktualisasi diri, juga kebutuhan akan kasih sayang sesama. Kebutuhan psikologi yang paling mendasar adalah kebutuhan perlindungan atau rasa aman yang apabila kebutuhan dasar ini dirasakan tidak dapat terpenuhi maka timbul rasa tidak betah. Kebutuhan rasa aman inilah yang sangat menonjol pada para pemukim di permukiman kumuh, walaupun keadaan rumah tidak permanen serta keadaan lingkungan yang jauh dari syarat kesehatan, mereka tetap betah tinggal di permukiman kumuh karna adanya rasa aman dan saling melindungi (Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa, Luthfi Muta'ali, Arif Rahman Nugroho, 2016).

### **1.5.1.4 Persepsi Masyarakat**

Menurut Sarlito Wirawan Saroni dalam bukunya "Psikologi Lingkungan" (1995) mengatakan bahwa persepsi adalah jika jumlah penginderaan disatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia dapat mengenali dan menilai objek-objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1988).

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah : stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan

dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi (Bowo Ardianto,2006).

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut *society* asal katanya *socius* yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin (2009) memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Soelaiman, dalam Musadun, 2000:86).

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Bowo Ardianto,2006).

Persepsi masyarakat paling mudah diukur menggunakan skala likert. Skala likert menggunakan butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan merespon 5 pilihan pada setiap butir pertanyaan, sangat setuju, setuju, tidak memutuskan, tidak setuju dan sangat tidak setuju (Likert 1932). Butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang merepresentasikan sifat individu misalkan pengetahuan, sikap dan perilaku. Kemudahan penggunaan skala likert menyebabkan skala ini digunakan peneliti dalam peneliti persepsi masyarakat terhadap program KOTAKU untuk mengetahui

keberhasilan Program KOTAKU terdapat beberapa variabel-variabel pertanyaan ajukan kepada masyarakat.

#### **1.5.1.5 Program KOTAKU**

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/ kota di 34 propinsi yang menjadi “*platform kolaborasi*” atau bisnis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemengku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguat kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukungnya tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh (Dok. Program KOTAKU Tahun 2015).

#### **1.5.1.6 Tujuan program KOTAKU**

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh

- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten/ kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik
- 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat Kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh

(Dok. Program KOTAKU Tahun 2015)

#### **1.5.1.7 Penanganan Permukiman Kumuh**

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi 3 pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang NO.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

##### **1) Pencegahan**

Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegahnya tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawas dan pengendali dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: ijin prinsip, izin lokai, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undang), standar teknis dan kelaikan fungsi

melalui pemeriksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

## 2) Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.

## 3) Pengelolaan

- a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan
- b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya
- c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
- d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan

Aspek yang ditangani mencakup seluruh aspek yang diidentifikasi sebagai gejala dan penyebab kumuh, baik dari aspek sosisl, ekonomi, fisik lingkungan, maupun aspek legal yang bertujuan untuk pencapaian visi kota tanpa kumuh.

(Dok. Program KOTAKU Tahun 2015)

### **1.5.2 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya merupakan peneltuian yang dilakukan seseorang sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau permasalahan pada penelitian ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi penulisan penelitian ini:

Bowo Adrianto (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Presepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu pada Swadaya Masyarakat Di Kota Magelang”. Tujuan penelitian tersebut adalah Mengkaji presepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman dan mengkaji partisipasi swadaya masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif menggunakan analisis kualitatif. Pengambilan sample dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengurus organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat RT, RW dan LPM yang sering dilibatkan dalam rencana kegiatan pembangunan. Masyarakat kurang aktif dalam memberi masukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ini yaitu variabel yang digunakan yaitu Presepsi masyarakat dan obyek penelitiannya sama-sama bertumpu pada pembangunan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian yang diambil, penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2006 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2020 dan jenis persepsi yang akan diteliti.

Zaini Musthofa (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Rrelokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)”. Tujuan penelitian tersebut adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Rrelokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta). Metode yang digunakan adalah Metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan sample *random sampling*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Relokasi yang dilakukan di Kelurahan Pucang-sawit sudah sangat berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Relokasi juga berhasil dalam memberikan perubahan fisik permukiman yang lebih baik, pada aspek ekonomi menimbulkan dampak yang buruk dan tidak berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat Aspek sosial dinilai berhasil dalam mempertahankan kondisi. Persamaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah variabel yang diteliti merupakan program, objek penelitian yang sama-sama menggunakan permukiman kumuh di Surakarta dan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang diteliti yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan indikator kekumuhan sedangkan penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan karakteristik responden dan penilaian responden.

Rory Novia Fitriani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Presepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa. (Studi Kasus: Perbandingan Pembangunan Infrastruktur Desa Plangitan Dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Pati)”. Tujuan penelitian tersebut adalah Mengetahui presepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso dan Desa Plangitan Kecamatan Pati dan mengetahui perbandingan presepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa antara 2 desa. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptif menggunakan analisis kualitatif kuantitatif. Teknik pengambilan sample *proportional area random sampling*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persepsi dan partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dan desa Plangitan dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di desanya sudah tergolong baik. Namun demikian masih terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan partisipasi dari masyarakat Desa Tanjungrejo dan desa Plangitan seperti persepsi yang negative terhadap pembangunan desa, kekecewaan terhadap program yang tidak berjalan dan hasil kurang memuaskan. Persamaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah variabel yang diteliti adalah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan yaitu partisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan hasil sedangkan penelitian ini menggunakan karakteristik responden dahulu kemudian penilaian masyarakat terhadap program. Sehingga dapat disimpulkan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini di tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2  
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Bowo Adrianto 2006	Presepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu pada Swadaya Masyarakat Di Kota Magelang	Mengkaji presepsi masyarakat terhadap pembangunan prasarana dasar permukiman dan mengkaji partisipasi swadaya masyarakat.	Metode deskriptif menggunakan analisis kualitatif. Pengambilan sample dengan teknik <i>purposive sampling</i> .	Pengurus organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat RT, RW dan LPM yang sering dilibatkan dalam rencana kegiatan pembangunan. Masyarakat kurang aktif dalam memberi masukan.
2.	Zaini Musthofa 2011	Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Rrelokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)	Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Rrelokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)	Metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan sample <i>random sampling</i>	Relokasi yang dilakukan di Kelurahan Pucang-sawit sudah sangat berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Relokasi juga berhasil dalam memberikan perubahan fisik permukiman

Lanjutan Tabel 1.2

No	Nama	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
					yang lebih baik, pada aspek ekonomi menimbulkan dampak yang buruk dan tidak berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat. Aspek sosial dinilai berhasil dalam mempertahankan kondisi.
3.	Rory Novia Fitriani 2017	Presepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa. (Studi Kasus: Perbandingan Pembangunan Infrastruktur Desa Plangitan Dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Pati)	Mengetahui presepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso dan Desa Plangitan Kecamatan Pati dan mengetahui perbandingan presepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa antara 2 desa.	Metode deskriptif menggunakan analisis kualitatif kuantitatif. Teknik pengambilan sample <i>proportional area random sampling</i> .	Persepsi dan partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dan Plangitan dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di desanya sudah tergolong baik. Namun terdapat faktor yang menjadi hambatan partisipasi dari masyarakat Desa Tanjungrejo dan Plangitan seperti persepsi yang negatif

Lanjutan Tabel 1.2

No	Nama	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
					terhadap pembangunan desa, kekecewaan terhadap program tidak berjalan.
4	Yunita Tri Wulandari 2020	Persepsi masyarakat terhadap program KOTAKU dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Sangkrah Kota Surakarta Tahun 2020.	Mengetahui persepsi masyarakat penerima manfaat setelah adanya Program KOTAKU sebagai upaya peningkatan serta pemeliharaan permukiman kumuh khususnya di Kampung Sangkrah.	Metode deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif. Teknik pengambilan sample <i>proportional random sampling</i>	Persespsi masyarakat terhadap program KOTAKU menghasilkan penilaian persepi sangat baik sebanyak 38 %, persepsi baik sebanyak 23 %, persepsi sedang sebanyak 11 %, persepsi buruk sebanyak 7 %, dan persepsi buruk sekali 21 %.

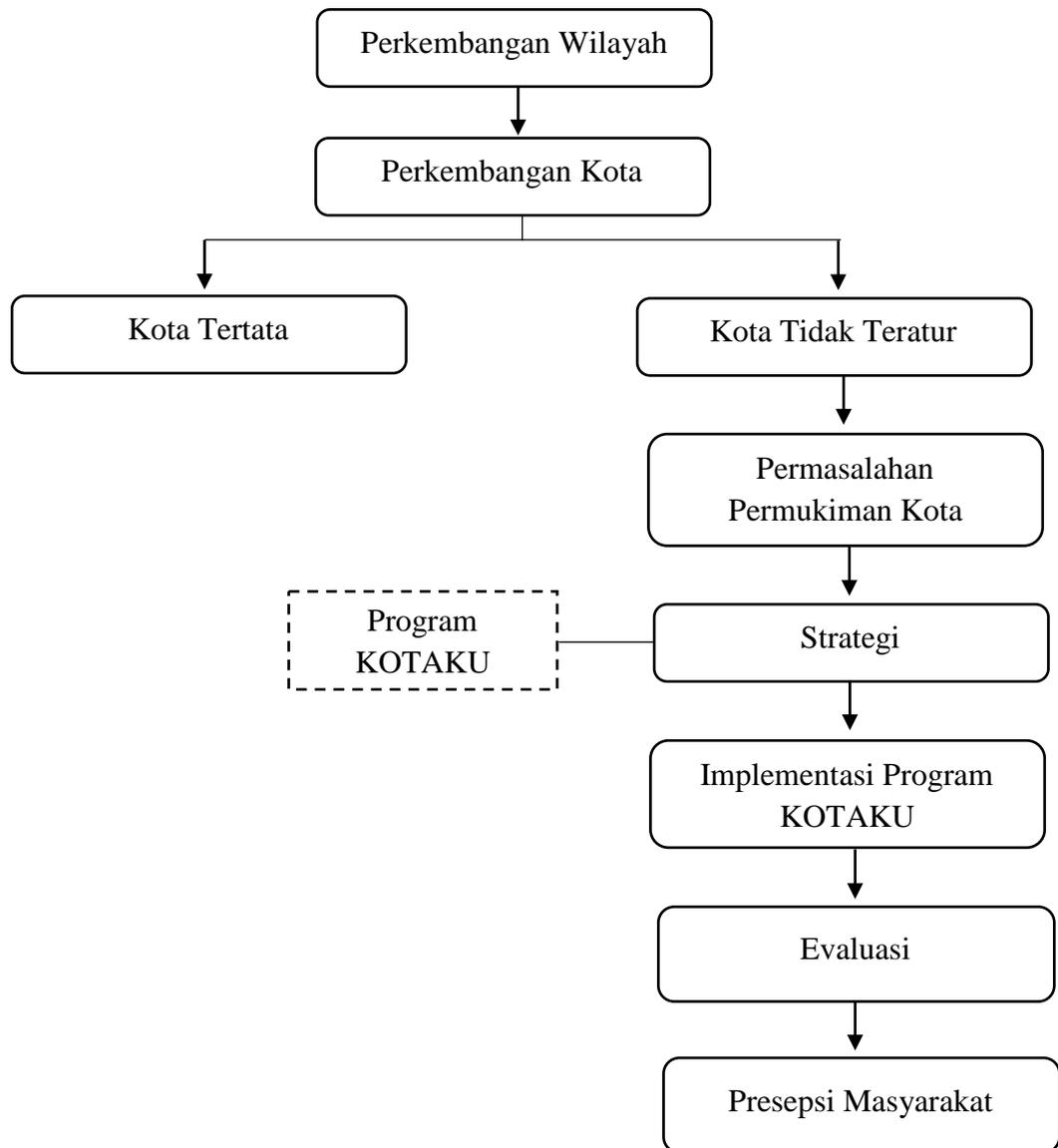
Sumber: Penulis,2020

## 1.6 Kerangka Penelitian

Perkembangan suatu wilayah yang berdampak langsung perkembangan sebuah perkotaan mengakibatkan sebuah perkotaan menjadi berubah wajah ada yang perkotaan yang tertata dan ada juga perkotaan yang tidak teratur. Perkotaan yang tidak teratur ini menyebabkan permasalahan permukiman di sebuah kota terutama masalah lingkungannya. Untuk mengatasi wajah permukiman yang tidak tertata maka pemerintah membuat berbagai strategi maupun kebijakan, hal ini berupa Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh dengan skala nasional, kota hingga kawasan. Sehingga kota yang tidak tertata akibat permukiman yang tidak teratur dan permukiman yang mengalami masalah lingkungan bias diatasi melalui Program KOTAKU ini.

Implementasinya Program KOTAKU untuk menanggulangi permukiman kumuh ini bisa membantu menangani permukiman kumuh di sebuah wilayah. Namun berjalannya program KOTAKU ini masih tumpang tindih dengan program sebelum program KOTAKU sehingga pelaksanaannya kurang optimal sehingga perlu sebuah evaluasi apakah Program KOTAKU ini telah mampu mengatasi permukiman kumuh di sebuah wilayah terutama di wilayah penelitian. Selain evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku program hingga fasilitator per kawasan ini, masyarakat perlu mengetahui apakah program ini sesuai yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan di permukiman. Pencapaian program ini dapat dilihat dari mengetahui karakteristik masyarakat sebagai responden serta penilaian terhadap program agar mengetahui hasil yang nyata dalam menuntaskan lingkungan kumuh Kampung Sangkrah serta mengetahui seberapa berhasil Program KOTAKU.

Dalam program KOTAKU tersebut peneliti persepsi masyarakat penerima program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh. Untuk mengetahui secara keseluruhan tentang kerangka penelitian, dijelaskan dalam diagram kerangka pemikiran pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

*Sumber: Penulis, 2020*

## 1.7 Batasan Operasional

**Masyarakat** adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Soelaiman, dalam Musadun, 2000:86).

**Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh** adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Walikota, yang digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Direktorat Jendral Cipta Karya).

**Permukiman** merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Muta'alim, Lutfi, 2016).

**Permukiman kumuh** merupakan permukiman yang tidak layak huni akibat tidak adanya keteraturan bangunan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

**Persepsi** adalah jika jumlah penginderaan disatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia dapat mengenali dan menilai objek-objek (Sarwono, Sarlito Wirawan. 1995).

**Program KOTAKU** (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/ kota di 34 propinsi yang menjadi “*platform* kolaborasi” atau bisnis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Direktorat Jendral Cipta Karya)